

**STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM MEMBANGUN KOLABORASI KEARSIPAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

Rindra Hermawan

rindra.probo.jatim2015@gmail.com

Satpol PP Damkar Kota Probolinggo

ABSTRACT

This article aims to analyze human resource management strategies in strengthening regional archival collaboration in Probolinggo City. This study employs a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis as data collection techniques. Research informants include leaders and staff of the Probolinggo City Library and Archives Office, representatives of related local government agencies, as well as community members and cultural activists. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing, with validation through source and method triangulation. The findings reveal that regional archival human resource management in Probolinggo City faces limitations in terms of the number and technical competence of professional archivists. Nevertheless, these limitations are mitigated by the development of collaborative practices involving communities and cultural groups grounded in local values such as mutual cooperation, tolerance, and social harmony. Human resource management strategies that emphasize collaborative competencies, participatory leadership, and the utilization of information technology have proven effective in strengthening inclusive and sustainable regional archival governance.

Keywords: public human resource management, collaborative governance, regional archives, local values, Probolinggo City.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam membangun kolaborasi kearsipan daerah di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pimpinan dan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta masyarakat dan pegiat seni budaya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDM kearsipan di Kota Probolinggo masih menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis arsiparis. Namun demikian, keterbatasan tersebut diimbangi oleh berkembangnya praktik kolaborasi yang melibatkan masyarakat dan komunitas budaya berbasis nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan tepo seliro. Strategi pengelolaan SDM yang berorientasi pada penguatan kompetensi kolaboratif, kepemimpinan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu memperkuat tata kelola arsip daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: manajemen sumber daya manusia publik, collaborative governance, kearsipan daerah, nilai lokal, kota Probolinggo.

PENDAHULUAN

Arsip memiliki peran fundamental sebagai memori kolektif bangsa yang menyimpan bukti sejarah, legalitas, serta dinamika kebijakan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Keberadaan arsip yang tertata dengan baik memungkinkan pemerintah daerah menjaga kontinuitas kebijakan, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Namun demikian, realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengelolaan sumber daya manusia dan lemahnya kolaborasi antar lembaga. Keterbatasan jumlah arsiparis profesional, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi persoalan yang kerap dijumpai dalam praktik kearsipan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya fungsi arsip sebagai sumber pengetahuan publik dan alat pendukung pengambilan keputusan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya membuka peluang baru bagi transformasi pengelolaan arsip. Masyarakat, komunitas literasi, dan pegiat seni budaya mulai berperan aktif dalam menyimpan dan merawat dokumen sejarah, naskah kuno, serta artefak budaya lokal yang sebelumnya berada di luar sistem kearsipan formal. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pengelolaan arsip yang bersifat birokratis menuju pendekatan kolaboratif dan partisipatif.

Dalam konteks tersebut, konsep collaborative governance menjadi relevan

untuk menjelaskan pentingnya keterlibatan multiaktor dalam pengelolaan arsip daerah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah tidak hanya memperluas basis sumber daya, tetapi juga memperkaya perspektif dan nilai dalam pelestarian arsip sebagai identitas kolektif daerah. Namun, keberhasilan kolaborasi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggeraknya.

Kota Probolinggo, sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sejarah dan budaya yang kuat, menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan kearsipan daerah. Meskipun telah memiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai lembaga formal, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas menuntut adanya strategi pengelolaan SDM yang inovatif dan kontekstual. Oleh karena itu, kajian mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam membangun kolaborasi kearsipan daerah menjadi penting, tidak hanya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola arsip berbasis nilai lokal dan partisipasi masyarakat.

TINJAUAN TEORETIS

Manajemen Sumber Daya Manusia Publik

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) publik merupakan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan pencapaian kinerja organisasi publik. Dalam konteks sektor publik, MSDM tidak semata-mata dipahami sebagai proses administratif pengelolaan pegawai, melainkan sebagai sistem pengelolaan manusia yang bertujuan membangun kapasitas institusional dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia publik memiliki peran sentral dalam

menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam sektor kearsipan daerah . Aparatur publik dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan adaptif, etika pelayanan, serta kepekaan sosial dalam menghadapi dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan strategis.

Secara konseptual, MSDM publik mencakup berbagai fungsi utama, antara lain perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta pembinaan budaya organisasi. Dalam konteks kearsipan daerah, fungsi-fungsi tersebut harus diarahkan untuk mendukung pengelolaan arsip yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM kearsipan di Kota Probolinggo masih menghadapi keterbatasan jumlah arsiparis profesional dan ketimpangan kompetensi teknis . Namun, kondisi tersebut tidak semata dipandang sebagai kelemahan struktural, melainkan sebagai tantangan yang dapat direspons melalui strategi pengelolaan SDM berbasis kolaborasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas manusia sebagai aktor kunci dalam membangun jejaring kerja sama lintas lembaga dan lintas sektor.

Dalam perspektif manajemen publik kontemporer, pengelolaan SDM yang efektif tidak lagi bersifat hierarkis dan tertutup, tetapi menuntut keterbukaan, partisipasi, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif. Oleh karena itu, MSDM publik dalam bidang kearsipan harus diarahkan untuk membentuk aparatur yang mampu berperan sebagai fasilitator, mediator, dan penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta komunitas budaya.

Teori Kompetensi Sumber Daya Manusia

Teori kompetensi sumber daya manusia menjadi landasan penting dalam

menganalisis kualitas dan kesiapan aparatur publik dalam menjalankan fungsi kolaboratif. Dalam penelitian ini, model kompetensi yang dikembangkan oleh Ulrich et al. (2012) digunakan sebagai kerangka konseptual utama untuk menilai dan merumuskan strategi pengelolaan SDM kearsipan daerah .

Model kompetensi Ulrich menempatkan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi, bukan sekadar pelaksana tugas administratif. Kompetensi SDM dipahami sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan individu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Dalam konteks organisasi publik, kompetensi ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi internal, tetapi juga pada penciptaan nilai publik.

Menurut Ulrich et al. (2012), terdapat beberapa peran kunci SDM yang relevan dengan konteks kolaborasi, antara lain sebagai strategic partner, change agent, human capital developer, dan employee champion. Penelitian ini menekankan bahwa dalam pengelolaan kearsipan daerah, aparatur perlu dikembangkan agar mampu menjalankan peran-peran tersebut secara seimbang.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai kearsipan di Kota Probolinggo masih berorientasi pada pekerjaan administratif rutin, dengan keterbatasan ruang untuk inovasi dan pengembangan kompetensi kolaboratif . Kondisi ini menjadi tantangan dalam membangun jejaring kolaborasi antarlembaga dan dengan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan SDM harus diarahkan pada penguatan kompetensi komunikasi lintas sektor, kemampuan negosiasi, serta adaptasi terhadap teknologi informasi.

Dalam konteks kearsipan daerah, kompetensi SDM tidak hanya mencakup kemampuan teknis pengelolaan arsip, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan mengelola pengetahuan

secara kolektif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya peran SDM sebagai penggerak utama kolaborasi kearsipan berbasis nilai lokal.

Dengan demikian, teori kompetensi SDM memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bahwa keberhasilan kolaborasi kearsipan daerah sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang terlibat di dalamnya. Penguatan kompetensi SDM menjadi prasyarat utama bagi terciptanya sistem kearsipan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Teori Collaborative Governance

Teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjadi landasan teoritis utama dalam menjelaskan dinamika kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan arsip daerah. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model birokrasi tradisional yang bersifat hierarkis dan top-down dalam menghadapi kompleksitas persoalan publik modern.

Collaborative governance didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara setara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama sebagai prasyarat utama keberhasilan kolaborasi.

Dalam konteks kearsipan daerah, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip tidak dapat lagi dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat, komunitas budaya, akademisi, dan aktor non-pemerintah lainnya menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan dan memanfaatkan arsip sebagai warisan kolektif.

Ansell dan Gash mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam collaborative governance, yaitu kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Penelitian

ini menemukan bahwa kepemimpinan partisipatif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo berperan penting dalam menciptakan ruang dialog dan kepercayaan antaraktor.

Namun demikian, kolaborasi tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan kapasitas antaraktor. Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Aparatur publik dituntut memiliki kemampuan fasilitasi, empati sosial, dan orientasi pelayanan yang kuat agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran formalitas semata.

Perspektif Knowledge Management dalam Kearsipan

Knowledge Management (KM) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pengelolaan pengetahuannya sebagai aset strategis organisasi. Dalam konteks kearsipan, arsip dipandang bukan hanya sebagai dokumen masa lalu, tetapi sebagai sumber pengetahuan yang memiliki nilai strategis bagi pengambilan keputusan dan pembentukan identitas kolektif.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa praktik kearsipan daerah di Kota Probolinggo mulai bergeser ke arah pengelolaan pengetahuan berbasis kolaborasi dan digitalisasi. Digitalisasi arsip tidak hanya memperluas akses publik, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyimpanan dan pemanfaatan arsip budaya tanpa menghilangkan hak kepemilikan.

Dalam perspektif KM, keterlibatan masyarakat dan komunitas budaya dipandang sebagai bentuk knowledge sharing yang memperkaya sistem kearsipan formal. Pengetahuan lokal, nilai budaya, dan pengalaman sosial masyarakat menjadi bagian integral dari ekosistem arsip daerah. Oleh karena itu, pengelolaan SDM kearsipan harus mampu memfasilitasi proses penciptaan,

penyimpanan, dan distribusi pengetahuan secara kolektif.

Kerangka Berpikir dan Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis yang telah diuraikan, penelitian ini membangun kerangka berpikir yang menempatkan pengelolaan sumber daya manusia sebagai variabel kunci dalam membangun kolaborasi kearsipan daerah. Kerangka ini mengintegrasikan konsep MSDM publik, teori kompetensi SDM (Ulrich et al.), collaborative governance (Ansell & Gash), serta perspektif *knowledge management* dalam kearsipan.

Penelitian ini merumuskan model konseptual “Penguatan SDM Kolaboratif Berbasis Nilai Lokal” sebagai sinpenelitian dari temuan empiris dan kajian teoritis. Model ini menekankan bahwa penguatan kompetensi kolaboratif SDM, kepemimpinan partisipatif, serta internalisasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan tepo seliro menjadi fondasi utama bagi tata kelola arsip daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel secara konseptual, tetapi juga memberikan arah strategis bagi pengembangan kebijakan pengelolaan SDM kearsipan daerah yang kontekstual dan berbasis nilai lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam membangun kolaborasi kearsipan daerah, khususnya dalam konteks nilai, makna, dan interaksi antaraktor.

Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas empiris secara kontekstual, tidak hanya melihat aspek formal dan administratif, tetapi juga memahami dinamika sosial,

budaya, serta nilai-nilai lokal yang melandasi praktik kolaborasi kearsipan di Kota Probolinggo. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap bagaimana aparatur publik, masyarakat, dan pegiat seni budaya memaknai arsip sebagai memori kolektif dan aset pengetahuan bersama.

Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai kondisi pengelolaan SDM kearsipan, mekanisme kolaborasi antar lembaga, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan membangun pemahaman konseptual dan empiris yang mendalam.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam membangun kolaborasi kearsipan daerah Kota Probolinggo. Fokus ini diturunkan ke dalam beberapa dimensi penelitian yang saling berkaitan, sebagaimana dirumuskan dalam penelitian.

Dimensi pertama adalah kondisi pengelolaan SDM kearsipan, yang mencakup jumlah, latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, serta peran aparatur dalam pengelolaan arsip daerah. Dimensi ini digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas internal organisasi dalam mendukung kolaborasi.

Dimensi kedua adalah mekanisme kolaborasi kearsipan, yang meliputi bentuk kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterlibatan masyarakat dan komunitas budaya, serta pola komunikasi dan koordinasi yang terbangun. Dimensi ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip collaborative governance diterapkan dalam praktik kearsipan daerah.

Dimensi ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan SDM dalam kolaborasi, yang mencakup aspek kepemimpinan, budaya organisasi, kompetensi kolaboratif, serta dukungan teknologi dan kebijakan. Dimensi ini

digunakan untuk mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural dalam membangun kolaborasi berkelanjutan.

Dimensi keempat adalah nilai-nilai lokal dalam praktik kolaborasi, seperti gotong royong, toleransi, dan tepo seliro, yang menjadi landasan moral dan sosial bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan arsip daerah. Dimensi ini menegaskan bahwa kolaborasi kearsipan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya setempat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan lokus utama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis dinas tersebut sebagai lembaga formal penyelenggara kearsipan daerah sekaligus penggerak kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat.

Selain kantor dinas, penelitian juga mencakup lokasi-lokasi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik kolaborasi kearsipan, seperti komunitas seni budaya, lembaga pendidikan, serta tempat penyimpanan arsip sejarah yang dikelola oleh masyarakat. Pendekatan multi-lokus ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran utuh mengenai ekosistem kearsipan daerah dan relasi antaraktor yang terlibat.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan dan memberikan perspektif yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Masing-masing wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif dan studi dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena memungkinkan analisis data dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kearsipan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan di Kota Probolinggo masih berada dalam tahap transisi menuju model pengelolaan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Secara struktural, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo telah menjalankan fungsi kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dari sisi kapasitas SDM, masih ditemukan sejumlah keterbatasan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan arsip daerah.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa jumlah arsiparis profesional masih terbatas dan belum sebanding dengan beban kerja serta kompleksitas pengelolaan arsip daerah. Sebagian pegawai kearsipan belum memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang kearsipan, sehingga kompetensi teknis masih diperoleh melalui pengalaman kerja dan pelatihan internal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan standar kearsipan modern, khususnya dalam pengelolaan arsip digital dan sistem informasi kearsipan.

Meskipun demikian, keterbatasan teknis tersebut tidak sepenuhnya menghambat kinerja organisasi. Penelitian ini menemukan adanya modal sosial yang kuat di kalangan aparatur, berupa semangat kerja kolektif, keterbukaan terhadap pembelajaran, dan kesediaan untuk berkolaborasi dengan aktor non-pemerintah. Budaya organisasi yang menekankan kebersamaan dan tanggung jawab sosial mendorong pegawai untuk melampaui batas peran administratif dan terlibat aktif dalam kegiatan kolaboratif.

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia publik, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak semata ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh sikap, nilai, dan orientasi pelayanan. SDM kearsipan di Kota Probolinggo mulai bertransformasi dari sekadar pelaksana administrasi menjadi fasilitator pengelolaan arsip berbasis partisipasi masyarakat. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kolaborasi kearsipan daerah.

Dinamika Kolaborasi Kearsipan Daerah

Dinamika kolaborasi kearsipan daerah di Kota Probolinggo memperlihatkan proses yang bersifat gradual dan kontekstual. Kolaborasi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui interaksi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, dan komunitas seni budaya. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi kearsipan berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bersama akan pentingnya pelestarian arsip sebagai memori kolektif daerah.

Bentuk kolaborasi yang teridentifikasi meliputi kerja sama antar OPD dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif, keterlibatan masyarakat dalam pendokumentasian sejarah lokal, serta partisipasi komunitas budaya dalam pelestarian naskah kuno dan artefak sejarah. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kultural, di mana terjadi pertukaran pengetahuan dan nilai antaraktor.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Pimpinan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog, membangun kepercayaan, dan mendorong keterlibatan berbagai pihak secara setara. Pola kepemimpinan ini sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menekankan pentingnya proses deliberatif dan komitmen bersama.

Namun demikian, dinamika kolaborasi juga menghadapi tantangan, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta ketimpangan kapasitas antaraktor. Dalam konteks ini, peran SDM kearsipan menjadi krusial sebagai penghubung (boundary spanner) yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga kesinambungan kerja sama. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi kearsipan daerah sangat bergantung pada kapasitas manusia yang mengelolanya, bukan semata pada struktur formal.

Peran Nilai Lokal dalam Praktik Kolaborasi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kuatnya peran nilai-nilai lokal dalam membentuk dan memperkuat praktik kolaborasi kearsipan daerah. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan tepo seliro tidak hanya menjadi norma sosial, tetapi juga menjadi landasan etis dalam interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan arsip.

Nilai gotong royong tercermin dalam kesediaan masyarakat dan komunitas budaya untuk berbagi arsip pribadi, dokumen sejarah, dan pengetahuan lokal tanpa orientasi keuntungan material. Praktik ini memperkaya khazanah arsip daerah sekaligus memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap warisan sejarah lokal. Sementara itu, nilai toleransi dan tepo seliro memfasilitasi kerja sama lintas latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan dalam kegiatan kearsipan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai lokal oleh aparatur kearsipan memperkuat kapasitas kolaboratif SDM. Aparatur tidak memosisikan diri sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai mitra masyarakat dalam menjaga memori kolektif. Pendekatan yang humanis ini meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan arsip daerah.

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, nilai lokal berfungsi

sebagai modal kultural yang memperkuat efektivitas kolaborasi. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam strategi pengelolaan SDM memungkinkan terciptanya praktik kearsipan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial dan budaya.

Implikasi terhadap Tata Kelola Arsip Daerah

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap tata kelola arsip daerah di Kota Probolinggo. Pertama, pengelolaan arsip daerah perlu dipandang sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, bukan semata tanggung jawab lembaga pemerintah. Hal ini menuntut perubahan paradigma dari model birokratis menuju model governance berbasis jejaring.

Kedua, strategi pengelolaan SDM kearsipan harus diarahkan pada penguatan kompetensi kolaboratif, kepemimpinan partisipatif, dan kemampuan mengelola pengetahuan. Investasi pada pengembangan SDM menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan arsip daerah.

Ketiga, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola arsip daerah memperkuat legitimasi sosial dan keberterimaan kebijakan kearsipan. Nilai lokal berfungsi sebagai jembatan antara sistem formal pemerintahan dan praktik sosial masyarakat, sehingga arsip tidak dipersepsikan sebagai domain eksklusif birokrasi, melainkan sebagai milik bersama.

Dengan demikian, tata kelola arsip daerah yang efektif dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, dan nilai budaya. Model penguatan SDM kolaboratif berbasis nilai lokal yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan sistem kearsipan daerah yang inklusif dan adaptif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat kolaborasi kearsipan daerah di Kota Probolinggo. Kondisi pengelolaan SDM kearsipan menunjukkan adanya keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis arsiparis, khususnya dalam penguasaan teknologi dan pengelolaan arsip digital. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak sepenuhnya menghambat kinerja kearsipan daerah karena didukung oleh modal sosial, budaya organisasi yang inklusif, serta kepemimpinan yang bersifat partisipatif.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik kolaborasi kearsipan daerah berkembang melalui keterlibatan multiaktor, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, dan komunitas seni budaya. Kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada efisiensi pengelolaan arsip, tetapi juga pada pelestarian nilai sejarah dan budaya lokal sebagai bagian dari memori kolektif daerah. Dalam konteks ini, SDM kearsipan berperan sebagai fasilitator dan penghubung yang menjembatani kepentingan birokrasi dengan aspirasi masyarakat.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah peran signifikan nilai-nilai lokal—seperti gotong royong, toleransi, dan tepo seliro—dalam memperkuat praktik kolaborasi kearsipan. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan etis dan sosial yang membangun kepercayaan antaraktor, mendorong partisipasi masyarakat, serta menciptakan iklim kerja sama yang berkelanjutan. Integrasi nilai lokal ke dalam strategi pengelolaan SDM terbukti memperkuat kapasitas kolaboratif aparatur dan meningkatkan legitimasi sosial tata kelola arsip daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi kearsipan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan struktur organisasi, tetapi terutama oleh kualitas

sumber daya manusia yang mengelolanya. Model konseptual “Penguatan SDM Kolaboratif Berbasis Nilai Lokal” yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan manajemen SDM publik dan praktik collaborative governance dalam bidang kearsipan daerah.

(2021). Collaborating with communities: Citizen science flood monitoring in urban informal settlements. *International Journal of Urban Planning and Community Research*, 14(2), 145–160.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Astutik, S. (2024). Sistem kearsipan dan tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 85–97.
- Kinanti, R. (2023). Penguatan kompetensi SDM kearsipan dalam kolaborasi lintas sektor. *Jurnal Kearsipan Indonesia*, 7(1), 23–38.
- Putra, A., & Wulandari, D. (2022). Community archives dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian arsip budaya. *Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 10(3), 211–225.
- Suyanti, T., Maryani, D., Polyando, P., & Achmad, M. (2025). Collaborative governance for stunting reduction: A qualitative case study from Bangka Regency, Indonesia. *Journal of Public Policy and Governance*, 5(1), 11–25.
- Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2012). *HR from the outside in: Six competencies for the future of human resources*. New York: McGraw-Hill.
- UNDP. (2023). *Collaborative governance and public sector capacity development*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyuni, L. (2024). Tantangan pengelolaan SDM kearsipan daerah di era digital. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(2), 101–118.
- Wijaya, A., & Suyanti, T. (2025). Strengthening collaborative governance for regional development: Lessons from Indonesia. *Journal of Administrative Innovation*, 3(4), 122–138.
- Wolff, E., French, M., Ilhamsyah, N., Sawailau, M. J., & Ramirez-Lovering, D.